

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses menua merupakan hal yang wajar dalam fase kehidupan manusia. Pada sebagian orang menjadi tua merupakan hal yang membahagiakan karena dapat mencapai puncak pada siklus kehidupan manusia, sehingga tidak berlebihan apabila masa ini disebut dengan usia emas, sebab tidak semua orang dapat merasakan dan melewati fase ini. Pertumbuhan yang senantiasa terjadi pada manusia, menyebabkan pula pesatnya peningkatan jumlah Lanjut Usia (selanjutnya ditulis Lansia) Indonesia yang merupakan hasil dari dinamika kependudukan yang terjadi melalui transisi demografi di Indonesia. Hasil proyeksi Badan Pusat Statistika (2017) menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1950-1970 Indonesia dihadapkan pada era *baby boom*, sedangkan proyeksi Sensus Penduduk tahun 2010 Indonesia dihadapkan pada era peledakan penduduk lanjut usia. Presentase Lansia Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 15 persen. Hampir lima dekade, presentase lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2017), yakni menjadi 8,97 persen (23 juta-an) dengan jumlah penduduk lansia perempuan 9,47 persen dan jumlah penduduk lansia laki-laki 8,48 persen. Selain hal itu, lansia Indonesia didominasi oleh kelompok umur 60-69 tahun yang presentasenya mencapai 5,56 persen dari penduduk Indonesia, sisanya diisi oleh kelompok umur 70-79 tahun dan 80+. Pada tahun 2017 sudah ada lima provinsi yang memiliki struktur penduduk tua di mana penduduk lansianya sudah mencapai 10 persen, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (13,90 persen), Jawa Tengah (12,40 persen), Jawa Timur (12,16 persen), Bali (10,79 persen), dan Sulawesi Barat (10,37 persen). (Badan Pusat Statistika, 2017).

Lima provinsi di atas menunjukkan data terkait dengan struktur penduduk tua yang penduduk lansianya sudah mencapai 10 persen bahkan lebih dari 10 persen. Jawa Barat tidak termasuk ke dalam kelompok struktur penduduk tua, akan tetapi jumlah penduduk Jawa Barat berdasarkan Badan Pusat Statistika Jawa Barat (2018) dengan 48.683.700 jiwa memiliki jumlah lansia yang tidak sedikit. (Badan Pusat Statistika Jawa Barat, 2018). Hasil Proyeksi Penduduk

Indonesia tahun 2010-2035, jumlah penduduk lansia di Jawa Barat pada tahun 2017 sebanyak 4,16 juta jiwa atau sekitar 8,67 persen dari total penduduk Jawa Barat, yang terdiri dari 2,02 juta jiwa (8,31 persen) lansia laki-laki dan sebanyak 2,14 (9,03 persen) lansia perempuan. (Badan Pusat Statistika Jawa Barat, 2017).

Berdasarkan data tingginya jumlah lansia, tentu hal tersebut perlu menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan kesejahteraan bagi lansia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, pasal 1 ayat 2 mendefinisikan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Proses menua ini merupakan hal yang alami yang disertai dengan adanya penurunan kondisi fisik, Psikis, dan soaial. Dalam kehidupan bermasyarakat, pada hakekatnya mayoritas masyarakat awam memandang bahwa lansia sebatas orang yang sudah sepuh sebagai individu yang sudah tidak dapat beaktivitas secara optimal bahkan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut memang wajar terjadi pada lansia karena mengalami beberapa penurunan kondisi fisik, psikis, dan sosial. Peningkatan jumlah penduduk lansia ini akan membawa dampak terhadap berbagai kehidupan. Dampak utama peningkatan lansia ini adalah peningkatan ketergantungan lansia. Ketergantungan ini disebabkan oleh kemunduran fisik, psikis, dan sosial lansia yang dapat digambarkan melalui empat tahap, yaitu kelemahan, keterbatasan fungsional, ketidakmampuan, dan keterhambatan yang akan dialami bersamaan dengan proses kemunduran akibat proses menua. (Yuliati, dkk, 2014, hlm. 88).

Oleh karena itu tingginya jumlah lansia harus segera ditangani secara serius dengan tindakan-tindakan preventif yang positif, sehingga lansia tidak dipandang sebagai individu yang akan menimbulkan masalah baik bagi individunya sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi menjadikan lansia sebagai individu yang memberikan kontribusi aktif dalam kehidupan sosial di masyarakat. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terkait dengan tingginya jumlah lansia yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang (selanjutna ditulis uu) No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah (selanjutnya ditulis Permen) No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia serta

kerjasama-kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan Lembaga-lembaga swasta yang ada di masyarakat. Dijelaskan dalam Permen No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pasal 1 ayat 4 dan 5 bahwa Lanjut usia terbagi menjadi dua bagian yaitu Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, sedangkan lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Tingginya jumlah lansia memberikan dampak negatif maupun positif bagi kehidupan tergantung dari pengaturan pengurusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam mengurus hal ini juga telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan berdasarkan hak otonom sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan daerah masing-masing, yang didukung pula dengan kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lansia di daerah. Pedoman dalam penanganan lansia yaitu uu no 13 tahun 1998 pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. Pelayanan Keagamaan dan mental Spiritual
- b. Pelayanan Kesehatan
- c. Pelayanan Kesempatan Kerja
- d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
- e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. Perlindungan Sosial
- h. Bantuan Sosial

Perhatian pemerintah dalam menanggapi hal tersebut kemudian menjadi titik awal adanya beberapa program yang pemerintah rancang untuk Lansia baik di tingkat provinsi Jawa Barat maupun kabupaten/kota Bandung. Dibentuknya Lembaga Lansia Indonesia (LLI) untuk melaksanakan pemberdayaan lansia secara holistik, terencana dan terpadu, sebab para lansia ini sangat berkontribusi bagi pembangunan melalui pemberdayaan lansia agar berdaya guna, sejahtera di masa tuanya. Pembentukan 497 Posbindu di Kabupaten Bandung untuk pelayanan kesehatan Lansia, serta Bantuan Warung dalam bentuk Usaha Ekonomi

kreatif. Pemenuhan Kesejahteraan Lansia dalam pelayanan Pendidikan dan Pelatihan serta Pelayanan Keagamaan dan mental Spiritual pemerintah Jawa Barat merancang sebuah Program Pelayanan Keagamaan dan Spiritual yang bekerja sama dengan salah satu Pesantren di Sukabumi. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial Pemerintah Kota Bandung merancang sebuah program Minggu Lansia, dengan Konsep Lansia (tidak ada keluarga/sendiri) yang ada di Kota Bandung akan ditemani oleh seorang *volunteer* yang akan membantu dalam segala aktivitas. Selain hal itu, banyak program-program yang dirancang oleh komunitas-komunitas nonpemerintah yang peduli terhadap lansia.

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu hak lansia yang harus terpenuhi, hal ini sejalan dengan konsep Belajar Sepanjang Hayat yang merupakan landasan dari Pendidikan Sepanjang Hayat serta hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya menuntut ilmu dari sejak dalam kandungan (buaian) sampai liang lahat. Pelayanan Pendidikan selain untuk pemenuhan hak kesejahteraan lansia juga dapat memberdayakan dan membuat lansia berdaya, mandiri, dan cakap sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, serta tidak menjadikan lansia dipandang sebelah mata dalam kehidupan sosial di masyarakat, akan tetapi lansia mampu untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan dan kehidupan sosial di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan merupakan hal penting untuk dibicarakan dan dilaksanakan oleh semua orang termasuk lansia. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1, bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Sifat pendidikan yang harus didapatkan oleh semua orang tanpa mengenal batas usia tidak menjadikan pendidikan bersifat kaku hanya terkait dengan sekolah, akan tetapi pendidikan dapat dijalankan melalui tiga jalur yaitu jalur formal, noformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya sebagai pemenuhan pendidikan bagi semua orang. Hal ini sejalan dengan isi uu no 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan pasal 13 ayat 1. Dalam pemenuhan Pendidikan bagi semua orang, Pendidikan Nonformal menjadi jalan keluar dalam pemecahan masalah ini. Hal ini berdasarkan pada uu no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 26 ayat 1:

Pendidikan Nonformal adalah Pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Berdasarkan hal tersebut bahwa tidak ada alasan lagi bagi setiap orang untuk tidak melaksanakan suatu pendidikan, sebab pendidikan merupakan sebuah keharusan selama manusia itu hidup dan dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal yang keduanya saling melengkapi, sehingga manusia akan senantiasa menjadi masyarakat pembelajar. Salah satu implementasi pendidikan sepanjang hayat dapat dijumpai pada Program Pesantren Masa Keemasan Daarut Tarbiyah di Pesantren Daarut Tauhiid Kota Bandung.

Program Pesantren Masa Keemasan (selanjutnya ditulis PMK) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh lembaga Daarut Tarbiyah yang dinaungi oleh Yayasan Pesantren Daarut Tauhiid. Program PMK ini merupakan program unggulan di Pesantren Daarut Tauhiid ini, sebab program ini sangat unik dan memiliki perbedaan yang sangat khusus yaitu program ini dilaksanakan khusus bagi orang yang memiliki usia 45 tahun ke atas dan sekarang sudah memasuki pada angkatan ke 39. Program PMK merupakan program pesantren mukim yang dilaksanakan selama 40 hari dengan jumlah kuota peserta setiap angkatannya berjumlah 35 orang. Dirancang dengan pendekatan pelatihan yang mengkombinasikan berbagai metode belajar andragogi (pembelajaran orang dewasa). Tujuan program ini yaitu Membina muslim dan muslimah masa keemasan agar memiliki aqidah yang lurus, ibadah yang benar dan akhlak yang mulia, Memfasilitasi muslim dan muslimah masa keemasan untuk mempersiapkan diri meraih husnul khotimah dengan ilmu aqidah, syariah dan pembiasaan ibadah harian, Membentuk muslim dan muslimah masa keemasan menjadi pribadi berkarakter BAKU (Baik dan Kuat). Pelaksanaan program PMK ini sejalan dengan pemenuhan pelayanan kesejahteraan yang tertuang dalam uu no 13 tahun

1998 tentang Kesejahteraan Lansia yaitu sebagai bentuk perhatian dari lembaga swasta bagi lansia dan pra lansia dalam pelayanan pendidikan serta pelayanan dalam keagamaan dan mental spiritual.

Program PMK sebagai program pendidikan yang masih bertahan sampai saat ini tentu memiliki sistem tersendiri dalam mempertahankannya. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas konsep Program PMK menjadi hal yang dapat dicontoh bagi program pendidikan lanjut usia, apalagi dengan melihat kondisi saat ini tingginya jumlah penduduk lansia di Indonesia, dan Jawa Barat khususnya. Berdasarkan hal itu, peneliti mengambil judul **“Penguatan Diri Meraih Husnul Khotimah melalui Program Pesantren Masa Keemasan di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan yang muncul terkait dengan kegiatan evaluasi ini antara lain:

- a. Semakin meningkatnya jumlah lansia di Indonesia, sehingga membutuhkan pengurusan dan pelayanan yang tepat
- b. Besarnya proporsi penduduk lansia di Jawa Barat yang apabila terus bertambah akan memasuki pada angka 10 persen, hal itu merupakan kategori struktur penduduk tua
- c. Kondisi Alamiah pada lansia adalah terjadinya penurunan kondisi fisik, psikis, dan sosial
- d. Perhatian pemerintah Jawa Barat untuk lansia dengan dirancang program-program khusus lansia dalam pemenuhan hak kesehatan dan kesempatan kerja
- e. Pentingnya pelaksanaan pendidikan bagi lansia sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat
- f. Pesantren Daarut Tauhiid memfasilitasi lanjut usia untuk mendapatkan pendidikan keagamaan dan membantu dalam mempersiapkan diri meraih husnul khotimah dengan diselenggarakannya program pesantren masa keemasan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelenggaraan Penguatan Diri Meraih Husnul Khotimah melalui Program Pesantren Masa Keemasan? Berdasarkan permasalahan pokok, maka secara lebih rincinya dipaparkan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut, yakni:

1. Bagaimana perencanaan program Pesantren Masa Keemasan di Pesantren Daarut Tauhiid?
2. Bagaimana pelaksanaan program Pesantren Masa Keemasan di Pesantren Daarut Tauhiid?
3. Bagaimana evaluasi program Pesantren Masa Keemasan di Pesantren Daarut Tauhiid?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelenggaraan Program Pesantren Masa Keemasan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perencanaan program PMK di Pesantren Daarut Tauhiid
2. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan program PMK di Daarut Tarbiyah Pesantren Daarut Tauhiid
3. Untuk mengetahui proses evaluasi pada program PMK di Pesantren Daarut Tauhiid

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pengelolaan program di Pesantren Daarut Tauhiid diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan keilmuan bidang pendidikan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal melalui Pelatihan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi kehidupan manusia yang telah memasuki masa lanjut usia untuk memahami implementasi pendidikan orang dewasa pra dan pasca pensiun

1.5.2 Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, serta evaluasi proses dari Program Pesantren Masa Keemasan.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang penyelenggaraan program pendidikan nonformal serta dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan program.

3. Bagi Lembaga Daarut Tauhiid

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai barometer serta sebagai media refleksi untuk melihat sejauh mana kebermanfaatan program yang telah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan pengembangan dalam pengelolaan program agar menjadi lebih baik lagi.

4. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur penelitian bidang pendidikan khususnya tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal melalui Pelatihan.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Adapaun struktur organisasi penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran garis besar isi skripsi hingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya.

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi.

1.6.2 BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori mengenai konsep-konsep pendukung yang berkaitan dengan Kosep Pelatihan, Manajemen pelatihan, Pendidikan Orang Dewasa, serta Konsep Lanjut Usia. Kajian Teori ini berfungsi sebagai Landasan Teoritis.

1.6.3 BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian dengan berbagai komponen lainnya seperti desain penelitian, Partisipan dan tempat penelitian, Teknik Pengambil data, Analisis Data, Subjek Penelitian, dll.

1.6.4 BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjabaran terkait dengan hasil temuan dan pembahasan yang menguraikan terkait dengan judul penelitian. Pembahasan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Simpulan dan Rekomendasi yang menyajikan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.